



KR-Franz Boedisukamanto

MASIH SEPI: Sejumlah pengunjung membeli kolong-kaling di kios buah Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa (4/3/2025). Thoha, pegawai Los 26 Sumber Rejeki di pasar tersebut menuturkan, harga jual kolong-kaling lokal Rp 12.000/kg dan kolong-kaling asal Medan Rp 15.000/kg, pada hari-hari awal Ramadan 1446 H ini masih agak sepi pembeli.

TEMUAN KPPU TERMASUK DI YOGYAKARTA

Mayoritas Bahan Pangan Dijual di Atas HET

JAKARTA (KR) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan sejumlah komoditas bahan pangan menjelang Ramadan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/3), Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamengala mengatakan, temuan tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan di pasar tradisional dan modern di tujuh wilayah Kantor KPPU di Medan, Lampung, Bandung, Surabaya, Samarinda, Makassar, dan Yogyakarta.

Terdapat 17 komoditas pangan yang dipantau, di antaranya beras, telur ayam, daging ayam, daging sapi, bawang putih, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan minyak goreng curah.

"Dari 17 komoditas itu, kami melihat bahwa terdapat delapan komoditas yang harga jual dari HET dan harga acuan penjualan (HAP) ini cukup signifikan," katanya.

KPPU mencatat komoditas pangan yang dijual di atas HET dan HAP adalah beras medium, beras premium, telur ayam, bawang putih, minyak goreng curah, MinyakKita, cabai rawit, dan gula pasir.

Mulyawan menyebut ada dua komoditas yang harganya paling jauh menyimpang dari HET dan HAP yang ditetapkan, yaitu telur ayam dan cabai rawit.

Ia juga menyoroti harga telur ayam di Bandung dan Yogyakarta hampir 50 persen lebih mahal dari HET/HAP yang ditetapkan.

Mulyawan menyatakan, KPPU akan menggunakan hasil survei ini sebagai dasar untuk mengawasi pelaku usaha komoditas di wilayah dengan deviasi harga dan kenaikan harga yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk memastikan mekanisme pasar berjalan lancar, terutama jika stok komoditas mencukupi. "Kami berharap pemerintah dan pihak berwenang dapat lebih mengendalikan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri," katanya.

Sementara itu Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) agar mengintensifkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memantau harga bahan pokok selama Ramadan.

Hal itu disampaikan Wamendagri Bima Arya Sugiarto pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang dirangkai Sertifikasi Produk Halal di Kemdagri, Jakarta, Selasa.

Ia juga mendorong Pemda melakukan upaya tersebut untuk memastikan pasokan bahan pokok tercukupi sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat. "Kemudian mendorong gerakan menanam. Rajin-rajin operasi pasar atau gerakan pangan murah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain," kata Bima.

Di sisi lain, Pemda juga diminta untuk bekerja sama dengan daerah yang mengalami produksi surplus untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok. Di samping itu, perlu pula untuk menambah suplai komoditas yang mulai langka di pasaran.

Bima menekankan Pemda perlu berkoordinasi dengan Perum Bulog dan pihak terkait agar pasokan komoditas dapat terpenuhi. (Ant/San)-f

RINGKANKAN VONIS SAAT PENYIDIKAN

Hasto Ajukan Tiga Ahli Hukum

JAKARTA (KR) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melalui penasihat hukum menggunakan haknya untuk menghadirkan tiga ahli hukum yang dapat meringankan vonis pada tahap penyidikan. Ketiga ahli tersebut terdiri dari dua ahli hukum pidana dan satu ahli hukum tata negara dari sejumlah universitas. Surat permohonan menghadirkan ahli meringankan telah disampaikan ke KPK siang ini.

Tim Penasihat Hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/3) mengungkapkan, pengajuan pemeriksaan ahli yang meringankan dalam tahap penyidikan ini adalah hak tersangka sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 65 KUHAP yang berbunyi, Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang

yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

"Ya, jadi setelah kami membahas di tim penasihat hukum dan sejalan dengan apa yang disampaikan mas Hasto, maka diputuskan hak tersangka sebagaimana diatur pada Pasal 65 KUHAP tersebut, kami gunakan," katanya.

Ronny juga mengingatkan KPK agar patuh pada KUHAP dan menghormati hak-hak tersangka yang sudah ditegaskan di undang-undang tersebut. Ia juga mengkhawatirkan adanya informasi perkara ini akan dikebut. "Jangan sampai KPK menghalalkan segala cara dan melanggar aturan yang berlaku dan menangani perkara ini secara tergesa-gesa. Apabila hal tersebut benar, KPK semakin menegaskan ada kepentingan politik atau ambisi pribadi di balik

proses hukum yang berlaku," jelasnya.

Ditambahkan, ahli hukum yang diajukan tersebut akan menjelaskan ke penyidik KPK hasil eksaminasi yang dilakukan Universitas Wahid Hasyim pada tanggal 3-4 Februari 2025 sesuai keahlian mereka. Ahli pidana akan menjelaskan tentang persoalan mendasar penyidikan KPK dalam kasus suap yang melenceng dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada putusan tersebut tidak ditemukan keterlibatan Hasto Kristiyanto sebagai pelaku.

"Sementara ahli hukum tata negara akan menjelaskan tentang perubahan yang dilakukan Hasto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP ke KPU adalah tindakan yang sah karena merupakan pelaksanaan putusan MA dan fatwa MA," pungkas Ronny. (Fu)-d

PEMBAHASAN RUU TNI PENTING

Cegah Munculnya Konflik TNI-Polri

JAKARTA (KR) - Pengamat demokrasi yang juga Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani, mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), penting untuk mencegah munculnya kasus-kasus konflik antara TNI dengan Polri.

Dalam 10 tahun terakhir, ia mencatat ada 37 kasus ketegangan antara dua institusi aparat negara tersebut di tingkat bawah. Pihaknya menilai, ketegangan itu muncul karena masalah sosiologis pragmatis yang dialami TNI. "Sebenarnya adalah soal argumen sosiologis pragmatis, ada ketimpangan kesejahteraan, ada ketimpangan peran, ada ketimpangan perlakuan dan seterusnya, khususnya dalam 20 tahun terakhir," kata Ismail saat rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (4/3).

Dalam 20 tahun terakhir, menurutnya, TNI adalah entitas yang keber-

adaannya sudah tidak lagi dioptimalkan sebagaimana mestinya. Di era sebelumnya, TNI yang masih bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) merupakan institusi militer yang juga memiliki kekuatan sosial dan politik.

Selain itu, jelasnya, TNI merasa terpinggirkan sejak 20 tahun terakhir karena masih ada yang memandang tentara seperti di era-era awal Reformasi. Saat itu banyak kritik keras agar tentara kembali ke barak dan kewenangannya dibatasi sedemikian rupa. "Pada akhirnya ia berada dalam satu handikap yang 'tidak berguna', padahal menurut banyak kalangan dan pimpinan TNI, banyak keahlian yang bisa dimanfaatkan oleh mereka," ujar Ismail.

Walaupun begitu, ia meminta agar perubahan UU TNI yang kini sedang dirancang harus mempertegas jaminan demokrasi, khususnya dalam penataan hubungan antara sipil dan militer.

Sementara itu, pakar keamanan dan pertahanan Dr Kusnanto Anggoro mengemukakan, TNI tidak mungkin kembali menerapkan sistem 'dwi-fungsi' seperti yang terjadi pada era orde baru.

Saat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang TNI dengan Komisi I DPR RI, Kusnanto mengatakan, ketika TNI masih bernama ABRI yang menganut sistem dwifungsi, militer memiliki fungsi pertahanan negara serta fungsi sosial dan politik. Hal itu tidak mungkin terjadi lagi karena sudah tidak ada lagi fraksi militer di DPR. "Saya kira kita tahu betul itu tidak akan mungkin lagi kembali, tetapi bahasa itu perlu dipakai," kata Kusnanto.

Dalam undang-undang yang masih berlaku, jelas Kusnanto, tidak sulit untuk memahami fungsi dari TNI. Ia menjelaskan, TNI memiliki fungsi yang berhubungan dengan pertahanan negara maupun nonpertahanan negara. (Ant)-d

DIGELAR PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY

Mangayubagya 36 Tahun Tingalan Jumenengan Sultan HB X

YOGYA (KR) - Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY menggelar acara 'Mangayubagya 36 Tahun Tingalan Jumenengan Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X'.

Acara yang dikemas dalam Sinau Sejarah Keistimewaan DIY ini diselenggarakan Jumat (7/3), pukul 09.00-11.00 di Bangsal Wiyata Praja, Komplek Kantor Gubernur DIY, dan ditayangkan *live streaming* melalui channel YouTube Paniradya Kaistimewaan DIY.

Sejarawan UGM, Baha Uddin MHum mengatakan, penobatan Sultan HB X merupakan yang pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. "Sultan HB X dinobatkan menjadi Raja Kasultanan Yogyakarta pada 7 Maret 1989, sudah periode Republik Indonesia," katanya.

Berbeda dengan ayah beliau Sultan HB IX, raja terakhir di Jawa yang dinobatkan oleh pejabat pemerintah kolonial Belanda Gubernur Lucien Adam pada 18 Maret 1940, masih dalam periode kolonial.

Ketika itu, lanjut Baha Uddin, setiap Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang hendak dinobatkan menjadi Sultan harus menandatangani kontrak politik (*lange contracten*) dengan pemerintah kolonial Belanda (Residen/Gubernur).

Menurut Baha Uddin, hal itu sudah terjadi sejak Sultan HB I menandatangani Perjanjian Giyanti dengan Gubernur Nicholas Hartingh pada 13 Februari 1755. "Terakhir kalinya kontrak politik itu dilakukan Sultan HB IX dengan Gubernur Lucien Adam pada 18 Maret 1940," jelasnya.



KR-Wawan Isnawan
Baha Uddin MHum

Tapi, lanjut Baha Uddin, setelah kemerdekaan semua berubah total. Penobatan Sultan tidak lagi harus melakukan kontrak politik dengan pemerintah kolonial.

Oleh karena itu, maka kemudian konsep filosofi Sultan yang sangat penting dalam konteks ini adalah Hamangku, Hamengku, Hamangkoni. Artinya, kedudukan Sultan itu yang pertama harus mengayomi semua rakyat, dan yang paling penting adalah kesejahteraan rakyat.

"Konsep tahta untuk rakyat menjadi salah satu pedoman penting dalam konteks keistimewaan sekarang ini, yaitu bagaimana Sultan baik sebagai raja maupun gubernur mewujudkan tahta untuk rakyat yang tujuan utamanya kesejahteraan rakyat di Yogyakarta khususnya," katanya.

Dalam konteks keistimewaan, Tingalan Jumenengan Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X ini menjadi sangat penting, karena pada saat itulah nilai-nilai filosofi yang penuh makna, dan simbol-simbol yang sangat mendalam menjadi sebuah kontestasi yang bisa dinikmati dan bisa dilihat oleh ma-

sarakat. Hal ini, menurut Baha Uddin, sesuai dengan keistimewaan Yogyakarta yang salah satu tujuannya adalah melestarikan kebudayaan dan filosofi yang ada di Kraton Yogyakarta.

Menurut Baha Uddin, dalam konteks pelestarian kebudayaan dan pemajuan kebudayaan, maka semua pihak dan stakeholder yang ada di Yogyakarta harus bersinergi, saling bahu membahu, saling membuat program bersama, agar pelestarian kebudayaan dapat tercapai, dan bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta.

Tingalan Jumenengan Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X juga menjadi sangat penting pada saat ini, karena Kraton Yogyakarta yang berkedudukan sebagai pelestari kebudayaan. "Ini menjadi event yang sarat dengan nilai-nilai filosofi Jawa, simbol, dan juga makna sangat mendalam dengan berbagai upacara," katanya.

Sekaligus Tingalan Jumenengan Dalem ini merupakan salah satu upaya melestarikan tradisi dan identitas Yogyakarta sebagai kraton yang mempunyai mandat pelestarian kebudayaan Jawa di Indonesia.

Acara 'Mangayubagya 36 Tahun Tingalan Jumenengan Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X' diwarnai dialog keistimewaan 'Hamangku, Hamengku, Hamangkoni' dengan narasumber Aris Eko Nugroho SP MSi (Paniradya Pati Kaistimewaan DIY), Baha Uddin MHum (Sejarawan UGM), Widhiasto Wasana Putra (Ketua Sekber Keistimewaan DIY) dipandu Wijil Rachmadani (moderator). Selain itu ada pula pemutaran video dokumenter, tari dan musik gamelan. (Wan)

Hikmah Ramadan

Diplomasi Iftar

Di suatu publikasi medsos terdapat judul berita yang berbunyi "Buka Puasa Bersama Suporter Indonesia, 19 Maret 2025 (Sydney)". Beberapa pemberitaan yang lain mengungkapkan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brunei Darussalam, di Selandia Baru, di Norwegia menyelenggarakan acara Buka Bersama bagi kalangan yang beraneka ragam, bahkan tidak hanya satu kali selama bulan Ramadan.

Rupanya bulan Ramadan benar-benar membawa berkah yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan diplomatik untuk berbagai kesempatan. Tulisan singkat kali ini sekadar memotret peristiwa-peristiwa Buka-Puasa-Bersama dalam perspektif hubungan antarbangsa, mencatat berbagai variasi yang menghiiasi kesempatan Buka-Puasa-Bersama yang ternyata bukan sekadar *moment* makan bersama, melainkan peristiwa berbagai untuk banyak hal. Dalam kajian hubungan internasional peristiwa itu disebut sebagai Diplomasi Iftar, diplomasi yang memanfaatkan Buka-Puasa-Bersama sebagai sarana mempererat hubungan antar-bangsa.

Dalam hal publikasi Sydney yang disinggung di atas, panitia menggabungkan sepakbola, buka-bersama dengan kemas dagang. Dalam postingannya dilengkapi dengan informasi bahwa "Tiket seharga \$20 termasuk menu buka-puasa dan kredit senilai \$10 untuk membeli merchandise Timnas (syal dan jersey) saat even". Ini merupakan kombinasi unik (sepakbola, buka bersama, jualan tiket, mobilisasi suporter) yang hanya bisa dilakukan pada bulan Ramadan. Dilihat dari harga tiket dan perolehannya, seperti ini adalah pekerjaan non-profit.

Lain lagi dengan yang diselenggarakan oleh KBRI, yang biasanya diadakan mumi melalui acara makan-bersama, yang tidak biasa adalah kalangan undangannya. Kalau makan bersama di kedutaan biasanya untuk kalangan diplomatik atau elite bisnis, diplomasi Iftar bisa dihadiri para pelajar dan mahasiswa, ataupun para diaspora. Rupanya KBRI sudah sejak lama menyelenggarakan diplomasi Iftar di hampir seluruh penjuruan. KBRI Paris, Berlin, Oslo, Brussel dan hampir seluruh Eropa selalu menyelenggarakan acara Buka-Puasa-Bersama dengan berma-

Tulus Warsito



cam-macam variasi kepentingan. Walau acara Buka-Puasa-Bersama kedergaan berbau Islam, jangan salah paham bahwa Kementerian Luar Negeri di negara-negara yang kita anggap kurang Islamiy juga selalu menyelenggarakannya. Kementerian Luar Negeri Israel misalnya, sering menyelenggarakan jamuan Buka-Puasa-Bersama untuk kalangan diplomatik dan para pemuka agama. Bahkan ada jejak informasi yang menunjukkan bahwa sesekali mereka menyelenggarakannya di Smpang Empat Agama di Jerusalem, suatu perempatan di situs kota kuno yang dibagi empat bagian wilayah untuk empat agama besar saat itu: yaitu untuk agama Yahudi, Kristen, Islam dan Armenia. Suatu peristiwa toleransi beragama yang seharusnya menularkan perdamaian politik di wilayah itu.

Begitu juga Kementerian Luar Negeri Norwegia dan beberapa negara nordist yang benderanya melambangkan Salib itu, mereka biasa saja menyelenggarakan Diplomasi Iftar di bulan Ramadan, walaupun untuk kalangan yang lebih sederhana, karena negeri mereka memang kecil.

Di Jakarta, Kementerian Luar Negeri maupun beberapa Kedutaan asing juga dengan gegap gempita menyambut Ramadan dengan acara Buka-Puasa-Bersama. Suatu ketika Kedubes Singapura mengajak beberapa panti asuhan dan para dhuaif di Jakarta dan sekitarnya untuk menikmati jamuan Buka-Puasa-Bersama. Tentu dengan membawa bingkisan untuk dibawa pulang. Kedubes lain di Jakarta memanfaatkan Diplomasi Iftar bagi kalangan pelajar, mahasiswa, maupun ibu-ibu. Singkat cerita, acara Buka-Puasa-Bersama dengan sangat flexible dapat digunakan untuk media diplomasi, bagi kalangan manapun (tidak hanya melulu muslim) terutama untuk kepentingan kemanusiaan dan perdamaian. Hal itu terjadi di mana-mana, tidak hanya di Timur Tengah saja melainkan juga di negara-negara non-muslim, bahkan Israel pun menyelenggarakannya. *SubhanaAllah!* (*)-f

Penulis adalah Guru Besar (emeritus) Diplomasi Kebudayaan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

TETAP SADAR DAN KOOPERATIF

Paus Fransiskus Dua Kali Gagal Napas

VATIKAN (KR) - Paus Fransiskus sempat mengalami dua kali gagal napas akut pada Senin (3/3) malam. Dua kali bronkoskopi harus dilakukan untuk mengeluarkan sekresi dan Paus kembali dibantu dengan alat bantu napas mekanis non-invasif, menurut laporan tersebut. "Hari ini, Bapa Suci mengalami dua kali insufisiensi pernapasan akut yang disebabkan oleh penumpukan signifikan mukus endobronkial yang mengakibatkan bronkopasme," ucap Kantor Pers Takhta Suci Vatikan.

Paus Fransiskus yang berusia 88 tahun tersebut dilaporkan masih dalam keadaan

sadar dan kooperatif sepanjang waktu. Paus Fransiskus dirawat di rumah sakit sejak 14 Februari akibat pneumonia ganda. Pada 18 Februari, Vatikan menyatakan bahwa Paus mengidap pneumonia bilateral dan kondisi klinisnya memburuk.

Pernyataan yang dirilis pada 21 Februari itu menyebutkan, tim dokter menyimpulkan bahwa nyawa Paus Fransiskus tak terancam, meski belum sepenuhnya keluar dari kondisi bahaya. Namun pada keesokan harinya, kondisi Paus dilaporkan kembali kritis usai menderita masalah pernapasan seperti asma yang berkepanjangan. (Ant/Has)-d